

**DAMPAK SISTEM ZONASI TERHADAP EKSISTENSI  
SMP ISLAM FATAHILLAH KOTA SUKABUMI**



Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Disusun Oleh:

**FIRDA PUTRI RAMDANI**

NIM :21104090059

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firda Putri Ramdani  
NIM : 21104090059  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam  
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya ini adalah asli hasil penelitian peneliti sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 26 Agustus 2025

Yang Menyatakan

  
Firda Putri Ramdani  
NIM. 21104090059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

### SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firda Putri Ramdani  
NIM : 21104090059  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam  
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan saya benar-benar berjilbab dengan kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan maka saya tidak akan menyangkut pautkan kepada pihak Fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarr-benarnya.

Yogyakarta, 26 Agustus 2025  
Yang Menyatakan,



Firda Putri Ramdani  
NIM. 21104090059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan pembimbingan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Firda Putri Ramdani

NIM : 21104090059

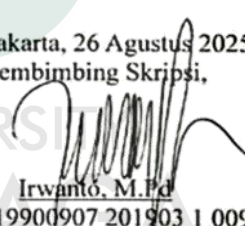
Judul Skripsi : **DAMPAK SISTEM ZONASI TERHADAP EKSISTENSI SEKOLAH SWASTA (Studi Kasus SMP Islam Fatahillah Kota Sukabumi)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan

Dengan ini kami mengharapkan agar Skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Agustus 2025  
Pembimbing Skripsi,

  
Irwanto, M.Pd

NIP. 19900907 201903 1 009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513056 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2913/Un.02/DT/PP.00.9/09/2025

Tugas Akhir dengan judul : DAMPAK SISTEM ZONASI TERHADAP EKSISTENSI SMP ISLAM FATAHILLAH  
KOTA SUKABUMI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIRDA PUTRI RAMDANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21104090059  
Telah diujikan pada : Jumat, 29 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Irwanto, M.Pd.  
SIGNED

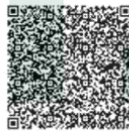
Valid ID: 68d33706f0c6



Penguji I

Nora Saiva Jannana, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 68d0e7bc51a3d



Penguji II

Drs. Edy Yusuf Nur Samsu Santosa, M.Si  
SIGNED

Valid ID: 68d339ab84471



Yogyakarta, 29 Agustus 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 68d34091e18f4

## MOTTO

*“Lakukan Apa Yang Ingin Kamu Lakukan”*

Penulis

*“Jalanilah Hidupmu Tanpa Penyesalan”*

Monkey D. Dragon (One Piece, 1132)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk*

*Almamater Tercinta*

*Program Studi Manajemen Pendidikan Islam*

*Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Dampak Sistem Zonasi Terhadap Eksistensi SMP Islam Fatahillah Kota Sukabumi” dengan baik. Shalawat serta salam kepada baginda alam, Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan, beserta keluarganya, shohabatnya, dan para pengikutnya.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, saran, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan banyak terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Bapak Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang telah memberikan arahan dan motivasi yang sangat berarti.
3. Ibu Siti Nurhidayah, S.Th.I., M.Sc., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang telah memberikan bantuan, arahan, motivasi dan saran yang berharga dalam penyelesaian penelitian ini.

4. Ibu Nora Saiva Jannana, M.Pd., selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Terimakasih atas segala saran dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani studi di Prodi MPI. Kontribusi yang sangat berarti dalam perjalanan akademis serta proses penyelesaian skripsi peneliti.
5. Bapak Heru Sulistya M. Pd. Selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama proses akademik di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.
6. Bapak Irwanto M.Pd. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, motivasi serta meluangkan waktu yang berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Tanpa bimbingan dan dukungan beliau, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Segenap Dosen dan Tenaga Kependidikan di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, atas Ilmu, dukungan dan layanan yang telah diberikan.
8. Ibu Suminar dan Bapak Yayan Mulyana, yang teristimewa. Terima kasih beribu-ribu terima kasih yang bahkan peneliti mungkin jarang ucapkan. Ungkapan terimakasih yang tidak pernah cukup untuk mengungkapkan rasa syukur atas kasih sayang yang tak terhingga serta doa-doa yang tak hentinya dilantunkan terkhusus untuk Mput. Terimakasih atas dukungan, rasa bangga, dan kebutuhan yang terpenuhi. Terimakasih untuk banyak hal, terimakasih, terimakasih, terimakasih. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian, yang ingin melihat putrinya sekolah setinggi-tingginya, terimakasih.

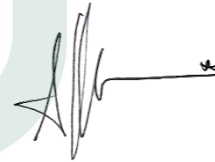
9. Tersayang Irna Fitriyani dan Reva Syahda Arifah, kedua saudari penulis yang selalu menjadi penguat penulis dalam menjalani hidup hari demi hari.
10. Tersayang Nenih Haerani dan Ai Sumarni, terimakasih atas dukungan-dukungan yang tiada hentinya.
11. Terkhusus Deni Fardiansyah, saudara, teman, sekaligus sahabat yang selama ini tumbuh bersama penulis. Terimakasih selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk melakukan hal-hal yang penulis inginkan, tanpa saran darinya mungkin penulis tetap melanjutkan bekerja dan melupakan keinginan untuk merasakan bangku perkuliahan. Terimakasih untuk selalu percaya dan membuat penulis bertekad bahwa penulis dapat melakukannya.
12. Teman-teman KKN 206 Kebumen, Najma Aufa Khansa, Hasna Sajidah Qurrotu'aini, Kurata A'Yuni, Hany Ahyun Usadani, Siska Ramadhani, Viana Aulia Pratiwi, Berlian Sanda Pratiwi, Fajar Muhammad Afiiq, Muhammad Haris Atrus Munawar, yang telah memberikan warna-warni kehidupan perkuliahan, terimakasih telah menjadi warna dan menghiasinya.
13. Teman-teman PLP, Rangga Saputra, Athira Imani, Fitria Maharani, Lulu, Siti Fitrianti, Ana Luthfiana, Izzul Haqqoe Al Karimah, terimakasih atas kebersamaan, bantuan dan dukungan selama satu tahun terakhir ini.
14. Teman-teman EL-NAQEEB (MPI 2021), yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang telah diberikan.
15. Kepada semua pihak dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas bantuan, dukungan dan motivasi selama masa perkuliahan dan proses

penyelesaian skripsi, atas segalanya semoga menjadi amal baik yang diterima oleh Allah SWT dan semoga diberikan balasan yang baik. *Aamiin yaa robbal'alamin.*

16. Terakhir, Firda Putri Ramdani. Kepada diri saya sendiri, terimakasih telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik, terimakasih untuk selalu percaya bahwa kamu bisa melakukannya. Terimakasih sudah berjuang sampai di titik ini, meski banyak takutnya terimakasih sudah bertahan. Terimakasih.

Yogyakarta, 26 Agustus 2025

Peneliti



Firda Putri Ramdani

NIM, 21104090059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

**Firda Putri Ramdani,** *Dampak Sistem Zonasi Terhadap Eksistensi SMP Islam Fatahillah Kota Sukabumi.* Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dampak kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi terhadap eksistensi SMP Islam Fatahillah Kota Sukabumi, upaya SMP Islam Fatahillah dalam menjaga eksistensinya dan upaya pemerintah dalam menyikapi dampak yang terjadi terhadap eksistensinya sekolah swasta di Kota Sukabumi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu yang memiliki pemahaman yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu, kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, sementara keabsahan data dijamin dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sistem zonasi berdampak secara signifikan terhadap SMP Islam Fatahillah, khususnya dalam penurunan jumlah peserta didik baru. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap eksistensi sekolah. (2) Dalam menjaga eksistensinya, sekolah berupaya meningkatkan layanan pendidikan, kualitas lulusan dan mengadakan program unggulan yaitu memadukan kurikulum nasional dengan pesantren. (3) Peran pemerintah dalam menyikapi dampak yang terjadi di sekolah-sekolah swasta Kota Sukabumi sangat minim, tidak terlihat akan keberpihakan pemerintah dalam mendukung eksistensi sekolah swasta. Meskipun sistem zonasi bertujuan untuk pemerataan pendidikan, secara tidak langsung mengancam eksistensi sekolah swasta, karena hanya melibatkan sekolah negeri dalam sasarannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan yang seimbang, tidak memberatkan salah satu pihak, sehingga tidak ada yang dirugikan. Dengan demikian, pemerataan akses pendidikan dapat tercapai dan eksistensi sekolah swasta tetap terjaga.

**Kata Kunci :** Sistem Zonasi, Sekolah Swasta, Kebijakan Pendidikan, Evaluasi Kebijakan



## ABSTRACT

**Firda Putri Ramdani**, "*The Impact of the Zoning System on the Existence of Fatahillah Islamic Junior High School in Sukabumi City.*" Thesis, Yogyakarta: Islamic Education Management Study Program, Faculty of Islamic Education and Teacher Training, Sunan Kalijaga State Islamic University, 2025.

This study aims to describe the impact of the New Student Admissions (PPDB) zoning system on the existence of Fatahillah Islamic Junior High School in Sukabumi City, the efforts of Fatahillah Islamic Junior High School to maintain its existence, and the government's efforts to address the impact on the existence of private schools in Sukabumi City.

This research is a qualitative study using a case study method. Data collection used observation, interviews, and documentation techniques. Research subjects were selected using a purposive sampling technique, namely those with relevant understanding of the research theme. Data analysis was conducted in three stages: data codification, data presentation, and conclusion drawing/verification. Data validity was ensured through source triangulation.

The research results show that: (1) the zoning system has a significant impact on Fatahillah Islamic Junior High School, particularly in reducing the number of new students. This condition has implications for the school's existence. (2) To maintain its existence, the school strives to improve educational services, the quality of graduates, and implements a flagship program, namely integrating the national curriculum with Islamic boarding schools. (3) The government's role in addressing the impacts on private schools in Sukabumi City is very minimal, with no apparent government support for the existence of private schools. Although the zoning system aims to equalize education, it indirectly threatens the existence of private schools because it only targets underprivileged schools. Therefore, a balanced policy is needed that does not burden either party, so that no one is disadvantaged. In this way, equal access to education can be achieved and the existence of private schools is maintained.

**Keywords :** Zoning System, Private Schools, Education Policy, Policy Evaluation

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
TRANSLITERASI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12

D. Telaah Pustaka .....	13
E. Kerangka Teori.....	20
1. Kebijakan Publik.....	20
2. Dampak Kebijakan.....	25
3. Sistem Zonasi .....	31
4. Eksistensi Sekolah Swasta .....	35
F. Metode Penelitian.....	38
1. Jenis Penelitian.....	38
2. Tempat dan Waktu Penelitian .....	39
3. Subjek Penelitian.....	39
4. Teknik pengumpulan Data .....	41
5. Teknik Analisis Data.....	43
6. Teknik Keabsahan Data .....	45
G. Sistematika Pembahasan .....	46
BAB II.....	47
GAMBARAN UMUM SMP ISLAM FATAHILLAH KOTA SUKABUMI .....	47
A. Profil SMP Islam Fatahillah Kota Sukabumi.....	47
B. Sejarah Singkat dan Perkembangannya SMP Islam Fatahillah Kota Sukabumi .....	48
C. Visi dan Misi SMP Islam Fatahillah Kota Sukabumi .....	49

D. Struktur Organisasi SMP Islam Fatahillah Kota Sukabumi.....	51
E. Sarana dan Prasarana SMP Islam Fatahillah Kota Sukabumi.....	53
F. Program Unggulan SMP Islam Fatahillah Kota Sukabumi .....	56
G. SMP Islam Fatahillah Kota Sukabumi Pasca Sistem Zonasi .....	56
BAB III.....	59
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	59
A. Dampak Sistem Zonasi Terhadap Eksistensi Sekolah Swasta di SMP Islam Fatahillah Kota Sukabumi .....	59
1. Dampak Kebijakan Terhadap Sasaran Utama Kebijakan (Intended Consequence).....	59
2. Dampak Kebijakan Terhadap Selain Sasaran Utama Kebijakan (Spillover or Unintended Effects).....	65
3. Dampak Kebijakan Pada Situasi Sekarang dan Yang Akan Datang (Antisipatif).....	79
4. Dampaknya Pada Biaya Langsung (Direct Costs).....	87
5. Dampaknya Pada Biaya Tidak Langsung (Indirect Costs) .....	89
B. Upaya SMP Islam Fatahillah Dalam Menjaga Eksistensi Sekolah.....	97
C. Upaya Pemerintah dalam Menyikapi Dampak yang Terjadi Terhadap Eksistensi Sekolah Swasta di Kota Sukabumi.....	100
BAB IV .....	105

KESIMPULAN DAN SARAN.....	105
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran.....	106
C. Kata Penutup.....	107
DAFTAR PUSTAKA .....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	114



## TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan disertasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S a'	S	Es ( dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H }	Ha ( dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	z	Zet ( dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	S } ad	S }	Es ( dengan titik di bawah)
ض	D } ad	D }	De ( dengan titik di bawah)
ط	T } a'	T }	Te ( dengan titik di bawah)
ظ	Z } a	Z }	Zet ( dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta' aqqidin
عدة	Ditulis	'iddah

## C. Ta' Marbutoh

### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya. kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

### 2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Kāramah al-auliya
----------------	---------	-------------------

### 3. Bila ta' Marbutoh hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah di tulis t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātal fiṭri
------------	---------	---------------

## D. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis
ـِ	Fathah	Ditulis
ـُ	Dhammah	Ditulis

## E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah + ya' mati	Di tulis	ā
يسعى	Ditulis	Yas'ā
Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī

كريم	Ditulis	Karīm
Dhammah + wawu mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	Furūd

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	Qaulun

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrop

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'idat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

##### 1. Bila diikuti Huruf qamariyah

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

##### 2. Bila diikuti Huruf syamsiyah di tulis dengan menggunakan Huruf syamsiyah yang mengikuti nya, serta menghilangkan Huruf (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samā'
الشمس	Ditulis	Asy-syams

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Siswa SMP Islam Fatahillah.....	8
Tabel 2 Data Rombongan Belajar Tahun Ajaran 2024/2025.....	9
Tabel 3 Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan .....	52
Tabel 4 Daftar Peserta Didik.....	53
Tabel 5 Daftar Sarana SMP Islam Fatahillah Kota Sukabumi.....	53
Tabel 6 Prasarana SMP Islam Fatahillah Kota Sukabumi .....	55
Tabel 8 Data Peserta Didik .....	57
Tabel 7 Data Sekolah Negeri di Kota Sukabumi .....	62
Tabel 8 Data Peserta Didik .....	67
Tabel 9 Data Sekolah Swasta di Kota Sukabumi.....	74
Tabel 10 Data Sekolah Swasta di Kota Sukabumi.....	77
Tabel 11 Rekapitulasi Jumlah Peserta Didik di .....	81

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Visi dan Misi SMP Islam Fatahillah Kota Sukabumi .....	49
Gambar 2 Program Unggulan SMP Islam Fatahillah .....	98
Gambar 3 Selebaran Pendaftaran Gratis SMP Islam Fatahillah .....	99
Gambar 4 Dokumentasi Wawancara.....	115
Gambar 5 Dokumentasi Observasi.....	117



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian.....	114
Lampiran 2 : Dokumentasi Observasi.....	116
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian .....	118
Lampiran 4 : Surat Keterangan Melakukan Penelitian .....	119
Lampiran 5 : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi .....	120
Lampiran 6 : Surat Bukti Seminar Proposal .....	121
Lampiran 7 : Kartu Bimbingan Skripsi.....	122
Lampiran 8 : Surat Keterangan Plagiasi.....	123
Lampiran 9 : Sertifikat PBAK.....	124
Lampiran 10 : Sertifikat TOEFL.....	125
Lampiran 11 : Sertifikat ICT.....	126
Lampiran 12 : Sertifikat PKTQ.....	127
Lampiran 13 : Sertifikat KKN.....	128
Lampiran 14 : Sertifikat PLP Magang .....	129
Lampiran 15 : Sertifikat User Education .....	130
Lampiran 16 : Curriculum Vitae.....	131

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu aspek krusial dalam membangun dan menghasilkan sumber daya manusia.<sup>1</sup> Pendidikan berperan dalam membantu manusia dalam mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan sehingga dapat beradaptasi dalam setiap perubahan yang terjadi.<sup>2</sup> Secara umum, manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya, tidak hanya untuk pengetahuan dan keterampilan tetapi juga untuk kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara.

Pendidikan adalah pondasi dari pembangunan, keberlangsungan, dan kemajuan suatu bangsa.<sup>3</sup> Pendidikan dijelaskan Dalam UU No.20 Tahun 2003 yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

---

<sup>1</sup> Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, kedua (PT Remaja Rosdakarya, 2023), 47.

<sup>2</sup> Asih Pangestuti, "Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan," *Jurnal READ (Research of Empowerment and Development)* 2, no. 1 (2021): 15, <https://doi.org/10.20884/1.read.2021.2.1.4337>.

<sup>3</sup> Nikita Putri Purwati dkk., "Implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di SMPN 59 surabaya," *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 3, no. 1 (2024): 162, <https://doi.org/10.31004/jpion.v3i1.247>.

masyarakat, bangsa dan negara.<sup>4</sup> Oleh karena itu peran pendidikan penting bagi warga negara dan negara wajib memfasilitasi hal tersebut. Sebagaimana telah tertuang dalam UUD 1945 bahwa pendidikan merupakan hak segala bangsa. Bahkan dalam Pembukaan UUD 1945 diamanatkan “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan Umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Menimbang hal tersebut negara menyelenggarakan sistem pendidikan yang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian UU tersebut diganti dan disempurnakan dalam Undang-Undang no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, agar sesuai dengan amanat perubahan UUD RI Tahun 1945.<sup>5</sup> Dalam perkembangannya sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa kali transformasi, hal tersebut meliputi: sistem manajemen pendidikan, perubahan kurikulum, dan metode evaluasi peserta didik.<sup>6</sup> Hal ini dilakukan agar individu mampu dan proaktif dalam menghadapi tantangan era yang senantiasa berubah.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Legislation No. 20 Tahun 2003, UU RI 37 (2003), <https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003>.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>6</sup> Nanang Martono, *Sekolah Publik vs Sekolah Privat: Dalam Wacana Kekuasaan, Demokrasi, dan Liberalisasi Pendidikan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 10.

Dalam sistem pendidikan di Indonesia terdapat dua jenis sekolah nasional, yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta. Sekolah negeri adalah sekolah yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah, dan sekolah swasta adalah lembaga pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh yayasan pendidikan swasta.<sup>7</sup> Sekolah berperan sebagai subsistem yang mengaplikasikan proses pembelajaran dan berinteraksi langsung dengan pengguna, yaitu peserta didik dan orang tua.<sup>8</sup> Sebelum mendapatkan pembelajaran calon peserta didik harus mengikuti beberapa tahapan, diantaranya ialah proses rekrutmen atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah yang dituju.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme dari serangkaian penyelenggaraan pendidikan. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun menjelang tahun pelajaran baru, dimana sekolah atau satuan pendidikan menyeleksi calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidak berdasarkan syarat dan ketentuan yang digunakan oleh masing-masing sekolah.<sup>9</sup> Meski pada prinsipnya tidak terdapat penolakan dalam PPDB bagi peserta didik yang memenuhi kriteria, kecuali jika kapasitas sekolah yang dituju tidak mencukupi atau jika periode PPDB telah berakhir.<sup>10</sup> Sejak awal

---

<sup>7</sup> Muhammad Fajri Islami dkk., “Perbandingan Kualitas Pendidikan Antara Sekolah Negeri Dan Sekolah Swasta: Eksplorasi Pada Aspek Pembelajaran,” *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan* 11, no. 2 (2024): 184, <https://doi.org/10.24246/j.jk.2024.v11.i2.p183-196>.

<sup>8</sup> Martono, *Sekolah Publik vs Sekolah Privat*, 67.

<sup>9</sup> Mila Karmila dan Niswatu Syakira, *Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru*, t.t.

<sup>10</sup> Deti Rostini dkk., *Teori dan Praktik Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru SMK, Pertama* (CV. Zeenbook Publishing, 2023), 38.

calon peserta didik dapat menentukan sekolah pilihannya sendiri, sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Di Indonesia saat ini penerimaan peserta didik baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi yaitu kebijakan pendaftaran peserta didik baru dimana sekolah menerima peserta didik yang bertempat tinggal di dalam zona wilayah yang ditetapkan pemerintah daerah.<sup>11</sup> Penerimaan peserta didik dilakukan berdasarkan pada jarak tempuh antara rumah peserta didik dengan sekolah yang bersangkutan. Pemberlakuan sistem zonasi merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengatur pembagian siswa berdasarkan zona wilayah tertentu, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan yang berkualitas di sekolah-sekolah terdekat.

Sistem Zonasi merupakan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menggantikan sistem Penelusuran Siswa Berprestasi (PSB) yaitu, sistem yang digunakan sebelumnya oleh masing-masing daerah dengan menggunakan NEM (Nilai Ebtanas Murni) yaitu nilai akhir yang diperoleh peserta didik dari hasil akhir Ujian Nasional (UN) sebagai seleksi dalam perekrutan calon peserta didik baru. Namun, sistem ini dianggap memiliki kelemahan dalam hal ketidakmerataan pendidikan, pasalnya peserta didik yang berprestasi cenderung akan berkumpul di sekolah favorit dan unggulan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ira Madiana dkk., “Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi serta Dampaknya terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan,” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 7, no. 2c (2022): 735–40, <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.633>.

<sup>12</sup> Wasitohadi dan Theresia Sri Rahayu, *Dinamika Sistem Pendidikan di Indonesia* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2023).

Karena calon peserta didik yang memiliki nilai yang tinggi berpeluang lebih besar untuk diterima dibandingkan dengan calon peserta didik yang memiliki nilai lebih rendah.<sup>13</sup> Dampaknya menimbulkan stigma masyarakat tentang sekolah-sekolah favorit dan sekolah-sekolah *non*-favorit. Menyikapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan PPDB sistem zonasi.

Sistem zonasi mulai diberlakukan sejak tahun 2017 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kemudian disempurnakan pada tahun 2018 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.<sup>14</sup> Peraturan ini mewajibkan sekolah yang dikelola oleh pemerintah untuk menerima calon peserta didik yang bertempat tinggal di radius zona terdekat dengan sekolah, dengan persentase 90% dari total jumlah daya tampung sekolah yang harus diterima. Kemudian pembatasan jumlah yang diterima berubah-ubah seiring dikeluarkannya peraturan baru yang merupakan revisi dari No. 14 Tahun 2018.

Sistem zonasi merupakan sebuah terobosan untuk pemerataan pendidikan dan menghilangkan label sekolah favorit dan tidak favorit di mata

---

<sup>13</sup> Didin Sirojudin dkk., *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri di DKI Jakarta*, 2020, 183.

<sup>14</sup> Madiana dkk., "Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi serta Dampaknya terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan."



masyarakat.<sup>15</sup> Sejatinya, sistem zonasi ini merupakan strategi pemerintah untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.<sup>16</sup> Namun dalam implementasinya hanya diberlakukan untuk sekolah negeri saja. Dampaknya timbul permasalahan salah satunya banyak sekolah swasta yang terpaksa tutup dikarenakan minimnya jumlah siswa yang mendaftar pada saat tahun ajaran baru, karena secara alamiah peserta didik baru akan memilih untuk memasuki sekolah favorit.

Sebelum diberlakukannya sistem zonasi, sekolah swasta menjadi alternatif pilihan orang tua ketika anaknya tidak lulus dalam seleksi NEM di sekolah negeri.<sup>17</sup> Namun dengan adanya sistem zonasi, eksistensi sekolah swasta dapat terancam karena jumlah siswa yang diterima oleh sekolah swasta menjadi terbatas dan bersaing ketat dengan sekolah negeri yang biasanya menjadi pilihan utama berdasarkan zona wilayah tempat tinggal siswa, terlebih jika di ruas wilayah zonasi terdapat sekolah negeri favorit.

Pemberlakuan sistem zonasi memiliki dampak yang signifikan terhadap eksistensi sekolah swasta terutama sekolah swasta *non-favorit* yang berada di daerah perkotaan dimana jarak antar sekolah negeri saling berdekatan dan harus bersaing juga dengan sekolah swasta favorit. Hal tersebut berupa

---

<sup>15</sup> Harianti dan Linda Novita Sukma, *Analisis Kebijakan Sistem Zonasi untuk Pemerataan Pendidikan di SMAN 1 dan 2 Kota Blitar*, 15 (2024): 27, <https://doi.org/10.21831/foundasia.v15i2.77352>.

<sup>16</sup> Lili Apriyanti dan Syunu Trihantoyo, *Persepsi Masyarakat Tentang Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru*, 10 (2022): 371.

<sup>17</sup> Dani Satria, "Dampak Pelaksanaan Kebijakan Peserta Didik Baru (PPDB Sistem Zonasi Terhadap Mutu Belajar Siswa di SMA Negeri 2 Bandar Lampung" (2019).

penurunan jumlah pendaftar dan kesulitan dalam memenuhi target siswa sehingga berdampak pada keberlangsungan operasional sekolah.<sup>18</sup> Selain itu, sekolah swasta *non-favorit* juga harus bersaing dalam hal kualitas pendidikan, fasilitas, dan tenaga pengajar dengan sekolah negeri yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan harus bersaing juga dengan swasta favorit.

Bagi sekolah negeri maupun sekolah swasta favorit yang memiliki anggaran keuangan yang cukup besar untuk mencapai kualitas yang baik adalah hal yang mudah. Kondisi ini berbeda dengan swasta *non-favorit*, sekolah ini hanya memiliki sedikit peminat. Kondisi ini tidak baik karena berhubungan dengan jumlah anggaran yang akan tersedia.<sup>19</sup> Kemudian ditambah dengan adanya kebijakan PPDB sistem zonasi, maka ini adalah masalah yang cukup signifikan bagi sekolah swasta *non-favorit*.

Jumlah murid tidak menjadi masalah besar bagi sekolah negeri, karena sekolah negeri mendapatkan anggaran secara rutin dari pemerintah. Sekolah negeri tidak perlu mengalokasikan anggaran untuk membayar gaji guru dan karyawan. Namun bagi sekolah swasta, kekurangan siswa adalah masalah utama. Hal ini akan berdampak pada masalah biaya sekolah, sedikit murid sama dengan sedikit pendapatan.<sup>20</sup> Sebagai institusi pendidikan yang berjalan dalam lingkup bisnis, sekolah swasta memiliki kebutuhan untuk menjaga

---

<sup>18</sup> Abdullah Fakhil Hilmi, "Lalu Lalang Kebijakan Zonasi Pendidikan," *Times Indonesia*, Desember 2024, <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/522541>.

<sup>19</sup> Martono, *Sekolah Publik vs Sekolah Privat*, 78.

<sup>20</sup> Martono, *Sekolah Publik vs Sekolah Privat*, 79.

jumlah murid tetap stabil. Hal tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan operasional dan keberlangsungan sekolah.

Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan peneliti, dampak tersebut terjadi di beberapa sekolah swasta di Kota Sukabumi. Salah satu sekolah swasta yang terdampak adalah SMP Islam Fatahillah yang mengalami penurunan jumlah siswa yang mendaftar secara drastis sejak diberlakukannya kebijakan PPDB sistem zonasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Siswa SMP Islam Fatahillah  
Sejak diberlakukannya PPDB Sistem Zonasi**

<b>Tahun Ajaran</b>	<b>Semester</b>	<b>Siswa Laki-laki</b>	<b>Siswa Perempuan</b>	<b>Jumlah Siswa</b>
2019/2020	Ganjil	63	41	104
2019/2020	Genap	62	41	103
2020/2021	Ganjil	44	40	84
2020/2021	Genap	21	18	39
2021/2022	Ganjil	25	26	51
2021/2022	Genap	26	25	51
2022/2023	Ganjil	28	25	53
2022/2023	Genap	30	25	55
2023/2024	Ganjil	33	24	57
2023/2024	Genap	34	24	58
2024/2025	Ganjil	31	25	56

Sumber : Dapodik Kemendikbud<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Kementerian Pendidikan dan Menengah Dasar, *Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)* (t.t.), <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/FB7906327DA44C22DDAC>.

Data rekap tersinkronisasi terakhir pada 1 Oktober 2024, dari data tersebut dapat dilihat penurunan jumlah peserta didik dari awal diberlakukannya PPDB sistem zonasi sampai dengan tahun ajaran saat ini. Jumlah keseluruhan siswa yang terdata saat ini hanya 56 siswa dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2 Data Rombongan Belajar Tahun Ajaran 2024/2025 Semester Ganjil**

No.	Uraian	Siswa Laki-laki	Siswa Perempuan	Total
1	Kelas 7	9	7	16
2	Kelas 8	9	7	16
3	Kelas 9	13	11	24

Sumber : Dapodik Kemendikbud<sup>22</sup>

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah peserta didik yang mendaftar atau kelas 7 pada tahun ajaran saat ini hanya sebanyak 16 siswa atau sebanyak satu rombongan belajar (rombel) kecil. Dengan total keseluruhan jumlah peserta didik dari ketiga tingkat kelas saat ini hanya sebanyak 56 siswa. Jumlah ini tentu saja sangat sedikit dan akan menjadi masalah terhadap sekolah, karena berdampak kepada kesejahteraan sekolah itu sendiri.

SMP Islam Fatahillah merupakan sekolah swasta yang berlokasi di kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Sekolah ini berada di bawah naungan Yayasan Tarbiyatul Muslimin Sukabumi yang mana yayasan tersebut hanya menaungi satu lembaga yaitu SMP Islam Fatahillah. Hal tersebut menjadikan

---

<sup>22</sup> *Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).*

SMP Islam Fatahillah menerima keseluruhan peserta didik dari sekolah luar. Meski begitu, sebelum adanya sistem zonasi SMP Islam Fatahillah cukup eksis di Kota Sukabumi dengan Akreditasi A (unggul) dan beberapa program pendidikan yang ditawarkan oleh SMP Islam Fatahillah menjadi daya tarik bagi orang tua siswa dan calon peserta didik. Tidak hanya itu, beberapa peserta didik tertarik bersekolah di SMP Islam Fatahillah karena letaknya yang sangat strategis yaitu dekat dengan pusat kota yang menjadikan daya tarik tersendiri bagi SMP Islam Fatahillah.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk membantu memahami fenomena ini adalah dengan menggunakan pendekatan evaluasi dampak Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa evaluasi dampak adalah menilai sejauh mana kebijakan yang dipilih untuk mengatasi masalah telah memiliki dampak tertentu.<sup>23</sup> Teori tersebut menyatakan bahwa setiap kebijakan memiliki dampak, baik yang diinginkan atau tidak. Dampak tersebut berpengaruh tidak hanya terhadap sasaran kebijakan tetapi juga selain sasaran kebijakan. Dalam hal ini sekolah swasta bukan sebagai sasaran kebijakan, karena sistem zonasi diperuntukkan hanya untuk sekolah negeri. Dengan menggunakan kerangka ini peneliti dapat menggali makna yang mendalam terhadap situasi yang dialami oleh SMP Islam Fatahillah.

Meskipun telah ada banyak kajian terkait kebijakan PPDB sistem zonasi, namun masih terbatas penelitian yang secara spesifik membahas

---

<sup>23</sup> Muh. Irfan Islamy, *Kebijakan Publik*, Kedua (Universitas Terbuka, 2014).

dampaknya terhadap sekolah swasta *non-favorit*. Padahal memahami fenomena ini penting dilakukan karena kebijakan tersebut secara langsung mempengaruhi distribusi peserta didik antar lembaga pendidikan. Sistem zonasi juga menempatkan sekolah swasta *non-favorit* pada posisi yang rentan dalam mendapatkan calon peserta didik, mengingat sekolah swasta selalu menjadi pilihan kedua setelah sekolah negeri, kebijakan ini dapat menjadi ancaman penutupan sekolah swasta yang tidak dapat bertahan. Dengan demikian pembahasan dampak kebijakan terhadap sekolah swasta *non-favorit* ini perlu dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas kebijakan ini, serta menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan agar tidak merugikan pihak tertentu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengkaji mengenai dampak kebijakan PPDB sistem zonasi terhadap eksistensi sekolah swasta agar dapat memahami perubahan yang terjadi dan menemukan solusi yang tepat untuk memastikan sekolah swasta tetap eksis sebagai penyedia layanan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait dampak dari kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi bagi sekolah swasta. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji **"Dampak Sistem Zonasi Terhadap Eksistensi SMP Islam Fatahillah Kota Sukabumi"**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi terhadap eksistensi SMP Islam Fatahillah Sukabumi?
2. Bagaimana upaya SMP Islam Fatahillah Sukabumi dalam menjaga keberlangsungan sekolah setelah penerapan PPDB sistem zonasi diberlakukan?
3. bagaimana upaya pemerintah dalam menyikapi dampak yang terjadi terhadap eksistensi sekolah swasta di Kota Sukabumi.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan persoalan pada latar belakang serta rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguraikan dampak dari kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi terhadap eksistensi SMP Islam Fatahillah Sukabumi?
- b. Untuk menguraikan upaya SMP Islam Fatahillah Sukabumi dalam menjaga keberlangsungan sekolah setelah penerapan PPDB sistem zonasi diberlakukan?
- c. Untuk menguraikan upaya pemerintah dalam menyikapi dampak yang terjadi terhadap eksistensi sekolah swasta di Kota Sukabumi.



## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan secara teoritis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem zonasi mempengaruhi sekolah swasta secara khusus, terutama dampak terhadap eksistensi sekolah swasta menengah kebawah.
- 2) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi untuk bahan evaluasi kebijakan PPDB sistem zonasi, sehingga pemerintah dapat memberikan kebijakan yang tepat dalam PPDB dalam mengelola sistem zonasi di Indonesia.

### **b. Kegunaan secara praktis**

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pendidikan serta penelitian selanjutnya tentang kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi serta dampak dari pemberlakuan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi terhadap eksistensi sekolah swasta di Kota Sukabumi.

## **D. Telaah Pustaka**

Di dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian yang relevan yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, yaitu diantaranya:

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Dani Satria “Dampak Pelaksanaan Kebijakan Peserta Didik Baru (PPDB Sistem Zonasi Terhadap Mutu



Belajar Siswa di SMA Negeri 2 Bandar Lampung” menunjukkan bahwa sistem zonasi dampak positif dalam PPDB yaitu adanya pemerataan terhadap pendidikan di Indonesia, dan sistem zonasi dalam PPDB memberikan dampak negatif yaitu berkumpulnya kemampuan siswa yang berbeda-beda dalam satu kelas yang menyebabkan minat belajar siswa menurun.<sup>24</sup> Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah objek penelitian, penelitian tersebut dilakukan di sekolah Negeri dengan kajian teori mutu belajar sedangkan penulis akan melakukan penelitian di sekolah swasta dengan kajian teori eksistensi sekolah.

2. Penelitian yang ditulis oleh Dani dan Irvan (2019) dalam artikel yang berjudul “Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama” hasilnya menunjukkan bahwa persentase dampak negatif dari diberlakukannya sistem zonasi lebih besar dari pada dampak positif yang dirasakan oleh guru, sekolah dan masyarakat.<sup>25</sup> Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah hal mendasar yaitu objek dan subjek penelitian.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Risna, Lisdahlia, dan Syamsul Edi (2020) “Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan” yang menunjukkan bahwa implementasi sistem zonasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal tersebut dilihat dari persentase dampak negatif

---

<sup>24</sup> Satria, “Dampak Pelaksanaan Kebijakan Peserta Didik Baru (PPDB Sistem Zonasi Terhadap Mutu Belajar Siswa di SMA Negeri 2 Bandar Lampung.”

<sup>25</sup> Dany Miftahul Ula dan Irvan Lestari, “Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama,” *Brilliant: Jurnal Riset dan Konseptual* 5, no. 1 (2020): 10, <https://doi.org/10.28926/briliant.v5i1.375>.

lebih banyak dirasakan dibandingkan dengan dampak positif.<sup>26</sup> Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah metode penelitian yang dipakai, penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kajian teori implementasi kebijakan.

4. Penelitian lebih lanjut “Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi” yang dilakukan oleh Kaffa, Budi, Gistituati (2021) menunjukkan hasil persentase dampak positif lebih tinggi dibandingkan dengan dampak negatif. Persentase tersebut berdasarkan persepsi guru dan orang tua.<sup>27</sup> Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut menggunakan pendekatan kepustakaan.
5. Penelitian Reynaldy dan Chamidah (2021) dalam penelitiannya “Sentiment Analysis for Zoning System Admission Policy Using Support Vector Machine and Naive Bayes Methods,” menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung tidak setuju dengan kebijakan penerimaan peserta didik sistem zonasi karena opini negatif lebih banyak dibandingkan dengan opini positif.<sup>28</sup> Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terdapat dalam metode yang digunakan, penelitian tersebut menggunakan metode pembelajaran statistik terbimbing yaitu Support Vector Machine (SVM) dan Naïve Bayes untuk analisis sentimen kebijakan penerimaan sistem zonasi.

---

<sup>26</sup> Syamsul Edi, *Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan*, t.t.

<sup>27</sup> Zelmi Kaffa dkk., *Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi*, 5 (2021).

<sup>28</sup> Reynaldy Aries Ariyanto dan N Chamidah, “Sentiment Analysis for Zoning System Admission Policy Using Support Vector Machine and Naive Bayes Methods,” *Journal of Physics: Conference Series* 1776, no. 1 (2021): 012058, <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1776/1/012058>.

6. Erni Damayanti (2021) dalam skripsinya “Problematika Birokrasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi di SMP N 1 Saptosari Gunungkidul Yogyakarta” hasil penelitiannya menunjukkan pengimplementasian sistem zonasi tetap dilakukan meski terdapat beberapa problematik baik dari dalam maupun dari luar sekolah.<sup>29</sup> Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah objek penelitian, penelitian tersebut dilakukan di sekolah Negeri dan teori yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan teori implementasi kebijakan.
7. Rihayati Eres (2022) dalam penelitiannya “Zonation Evaluation System In Recruitment New Student To Senior High School At Sukabumi Down Town” hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa sistem zonasi pada PPDB tidak berpengaruh besar di zona wilayah pusat kota tetapi berdampak pada sekolah swasta yang jumlah peserta didik barunya berkurang, karena banyak yang beralih ke sekolah swasta.<sup>30</sup> Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Rihayati eres adalah objek penelitian, Rihayati memfokuskan penelitian pada sekolah jenjang atas negeri, sedagka peneliti memfokuskan pada satu sekolah swasta. Persamaan peneliti dengan penelitian tersebut adalah tempat penelitian sama-sama dilakukan di pusat Kota Sukabumi.

---

<sup>29</sup> Erni Damayanti “Problematika Birokrasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi di SMP N 1 Saptosari Gunungkidul Yogyakarta”. 2021

<sup>30</sup> Eres Rihayati, “Zonation Evaluation System In Recruitment New Student To Senior High School At Sukabumi Down Town,” *Jurnal Penelitian Dan Penilaian Pendidikan* 4, no. 1 (2022): 40–51, <https://doi.org/10.22236/jppp.v4i1.8380>.

8. Muhammad, Suswati, dan Devi (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar” hasilnya menunjukkan bahwa implementasi PPDB sistem zonasi di SMPN Kabupaten Tanah Datar selama tiga tahun sejak diterapkannya ditemukan beberapa permasalahan dilapangan yaitu diantaranya, pemetaan zona yang belum akurat, kuota jumlah peserta didik baru yang belum sesuai dengan kebutuhan sekolah, banyaknya sekolah yang melanggar ketentuan zonasi, kurangnya sosialisasi akan PPDB sistem zonasi kepada masyarakat dan menurunnya motivasi dan prestasi peserta didik.<sup>31</sup> Perbedaan peneliti dengan penelitian tersebut yaitu pada objek dan tempat penelitian,
9. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Risca, Anang, dan Radeni (2023) yang berjudul “Dampak Sistem Zonasi pada Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Pertama terhadap Minat Belajar Siswa Kelas 6” penelitiannya menunjukkan hasil bahwa dampaknya sangat bervariasi hal tersebut tergantung dengan bagaimana letak geografis dan karakteristik individu peserta didik. Dampak utamanya ialah perubahan aspirasi sekolah impian yang tidak dapat dijangkau karena faktor zona, sehingga mempengaruhi motivasi belajar peserta didik.<sup>32</sup> Penelitian tersebut

---

<sup>31</sup> Muhammad Jamil dkk., “Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar,” *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan* 11, no. 3 (2023): 1089–103, <https://doi.org/10.47668/pkwu.v11i3.941>.

<sup>32</sup> Risca Candra Vinalistyosari dkk., *Dampak Sistem Zonasi pada Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Pertama terhadap Minat Belajar Siswa Kelas 6*, 06, no. 01 (2023).

difokuskan pada dampak sistem zonasi terhadap minat belajar, sedangkan peneliti akan mengkaji dampaknya terhadap sekolah swasta

10. Dalam penelitian yang berjudul “Harapan pemerataan menghadirkan kesenjangan: analisis dampak kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) Kota Tanjung” diteliti oleh Novi, Khairi, dan Octa (2023) hasilnya menunjukkan bahwa sistem zonasi belum berhasil dalam mencapai pemerataan akses dan kualitas pendidikan, dampaknya dari kebijakan ini yaitu bahwa sistem zonasi tidak tersebar secara merata, menyebabkan banyak sekolah yang kelebihan siswa dan yang lainnya harus ditutup karena minimnya siswa. kendati demikian sistem zonasi mendapatkan banyak respon positif dibandingkan dengan negatif.<sup>33</sup> Perbedaan peneliti dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut mengkaji implementasi kebijakan sedangkan peneliti dampak dari kebijakan.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, terlihat adanya sejumlah persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sebagian besar penelitian terdahulu membahas kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi dan dampaknya terhadap dunia pendidikan. Hasil penelitian tersebut umumnya menunjukkan bahwa sistem zonasi membawa dua sisi ditinjau dari dampaknya, yakni dampak positif berupa pemerataan akses pendidikan dan dampak negatif

---

<sup>33</sup> Novi Winarti dkk., “Harapan Pemerataan Menghadapi Kesenjangan: Analisis Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Tanjungpinang,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 49, no. 2 (2023): 210–25, <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i2.3579>.

berupa menurunnya motivasi belajar siswa, tidak meratanya distribusi peserta didik, hingga munculnya berbagai problematika lainnya. Selain itu, sebagian penelitian juga menggunakan kerangka teori mutu belajar, motivasi siswa, dan implementasi kebijakan pendidikan, sehingga lebih menekankan pada kualitas pembelajaran di sekolah negeri sebagai dampak dari sistem zonasi.

Meskipun memiliki persamaan dalam mengkaji kebijakan sistem zonasi, penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Perbedaan pertama terletak pada objek penelitian. Jika penelitian terdahulu mayoritas berfokus pada sekolah negeri sebagai sasaran utama sistem zonasi, maka penelitian ini justru menyoroti sekolah swasta menengah ke bawah yang terdampak oleh sistem zonasi. Hal ini penting karena selama ini sekolah swasta, khususnya sekolah swasta menengah ke bawah, seringkali terabaikan dalam kajian kebijakan PPDB sistem zonasi. Perbedaan lainnya terletak pada teori yang digunakan. Penelitian terdahulu umumnya menggunakan teori mutu belajar, motivasi, atau implementasi kebijakan, sedangkan penelitian ini mengkaji dari sudut pandang eksistensi sekolah, yaitu bagaimana sistem zonasi berdampak terhadap keberlangsungan sekolah swasta.

Selain itu, dari segi metode dan konteks lokasi, penelitian ini juga memiliki perbedaan yang jelas. Penelitian terdahulu menggunakan berbagai pendekatan, mulai dari metode kualitatif deskriptif, analisis kebijakan, hingga pendekatan statistik berbasis *machine learning* untuk membaca sentimen masyarakat. Namun, penelitian ini akan lebih menekankan pada observasi

lapangan dan kajian empiris terhadap kondisi nyata SMP Islam Fatahillah Kota Sukabumi. Dari segi lokasi, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan di Bandar Lampung, Yogyakarta, Tanah Datar, dan Tanjung, sementara hanya sedikit yang meneliti konteks Kota Sukabumi, itupun dengan fokus pada sekolah negeri. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan konteks lokal yang lebih spesifik pada sekolah swasta di Kota Sukabumi.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada tiga aspek utama, pertama, fokus pada sekolah swasta menengah ke bawah yang rentan terdampak zonasi. Kedua, penggunaan kerangka teori eksistensi sekolah yang jarang dipakai dalam kajian serupa. Ketiga, konteks lokasi Kota Sukabumi yang selama ini belum banyak diteliti. Kebaruan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai dampak zonasi secara lebih komprehensif, serta memberikan kontribusi nyata bagi perumusan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan “*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*”. Pemahamannya adalah bahwa kebijakan publik itu dibuat oleh pemerintah yang isi atau



substansinya mengenai yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan dipilih untuk tidak dilakukan.<sup>34</sup>

Dalam kutipan lain Dye mendefinisikan kebijakan publik “*what government do, why they do it, and what difference it makes*”, adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.<sup>35</sup> Artinya pemerintah bertugas untuk mengatur dan menyediakan layanan yang diperlukan bagi masyarakat, seperti pendidikan, keamanan, dan infrastruktur. Pemerintah melakukannya untuk menciptakan stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan, yang berdampak pada kualitas hidup dan perkembangan masyarakat.

Menurut Richard Rose, kebijakan dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang saling terkait dengan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul bagi pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, Carl Friedrich mendefinisikan kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu, yang menciptakan tantangan dan peluang bagi kebijakan yang diusulkan untuk diterapkan dan diatasi demi mencapai tujuan atau merealisasikan maksud tertentu.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Islamy, *Kebijakan Publik*, 1.3.

<sup>35</sup> Dr. Riant Nugroho, *Public Policy*, Revisi (PT Elex Media Komputindo, 2009), 83.

<sup>36</sup> Budi Wiranto, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (MedPrees, 2007), 17–18.



Menurut James E. Anderson, kebijakan publik didefinisikan sebagai sebuah rangkaian tindakan yang bertujuan yang diambil oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam menangani suatu masalah atau isu yang menjadi perhatian. Ini merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang berkaitan dengan masalah tertentu. Dalam konteks ini, seorang aktor dapat merujuk pada eksekutif, seperti keputusan yang diambil oleh Presiden, sementara sejumlah aktor mencakup baik eksekutif maupun legislatif, seperti yang tercermin dalam undang-undang.<sup>37</sup>

Definisi sederhana kebijakan publik menurut Rian Nugroho adalah keputusan yang dibuat negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan suatu negara.<sup>38</sup> Sedangkan Islamy menyederhanakan kebijakan publik sebagai apa saja yang dilakukan oleh pemerintah (*the actions of government*).<sup>39</sup>

Definisi kebijakan publik disajikan sebagaimana sudut pandang penulisnya namun, Islamy menambahkan setiap kebijakan publik didalamnya terkandung unsur-unsur:

- 1) Serangkaian tindakan,
- 2) Dilakukan oleh seorang aktor (pemerintah) atau sejumlah aktor (pemerintah dan pemerintah),

---

<sup>37</sup> Islamy, *Kebijakan Publik*, 1.4.

<sup>38</sup> Nugroho, *Public Policy*, 58.

<sup>39</sup> Islamy, *Kebijakan Publik*, 1.13.

- 3) Adanya suatu masalah tertentu,
- 4) Mempunyai suatu tujuan atau berorientasi pada kepentingan publik.

Mengacu pada Hogwood dan Gunn, istilah kebijakan merujuk pada berbagai jenis aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk pernyataan niat pemerintah, usulan tindakan, keputusan yang diambil oleh otoritas formal untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program-program pemerintah, hasil dari kebijakan yang diterapkan, dampak dari pelaksanaan kebijakan, serta teori dan model kebijakan. Selain itu, kebijakan juga dipahami sebagai suatu proses yang mencakup perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.<sup>40</sup>

Sistem zonasi pada dasarnya merupakan sebuah kebijakan publik di bidang pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan merujuk pada berbagai definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli, dalam penelitian ini sistem zonasi ditempatkan sebagai sebuah tindakan yang dipilih pemerintah dengan tujuan tertentu, yakni pemerataan akses pendidikan. Namun, sebagaimana ditegaskan Dye, kebijakan publik bukan hanya soal apa yang pemerintah lakukan, melainkan juga apa yang tidak dilakukan, sehingga penelitian ini juga dapat mengkritisi sisi kelemahan kebijakan yang tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap eksistensi sekolah swasta.

---

<sup>40</sup> Islamy, *Kebijakan Publik*, 1.13.

Kedudukan teori kebijakan publik dalam penelitian ini adalah sebagai landasan untuk memahami bagaimana sebuah kebijakan akhirnya dilaksanakan serta memiliki konsekuensi atau dampak bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks sistem zonasi, pihak yang terdampak tidak hanya sekolah negeri sebagai sasaran utama, tetapi juga sekolah swasta yang bukan merupakan sasaran utama sistem zonasi, dampak yang timbul diantaranya yaitu banyak sekolah swasta harus menghadapi penurunan jumlah peserta didik setelah sistem zonasi dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan pandangan Richard Rose yang melihat kebijakan sebagai serangkaian aktivitas dengan konsekuensi bagi aktor yang terlibat, serta pandangan Carl Friedrich yang menekankan kebijakan sebagai arah tindakan yang dapat menciptakan peluang sekaligus tantangan.

Selain itu, teori kebijakan publik juga memberikan kerangka untuk menjelaskan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk sistem zonasi, tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur utama yaitu, adanya serangkaian tindakan, adanya aktor, adanya masalah yang hendak diatasi, serta adanya tujuan tertentu. Dengan demikian, teori kebijakan publik membantu penelitian ini dalam menilai apakah sistem zonasi berhasil mencapai tujuan yang dicanangkan, sekaligus mengungkap dampak tidak langsung yang justru menekan eksistensi sekolah swasta menengah ke bawah.

Kajian teori kebijakan publik memberikan dasar untuk melihat bahwa kebijakan zonasi tidak hanya berdampak pada distribusi siswa, tetapi juga pada keberlanjutan layanan pendidikan oleh sekolah swasta. Dengan merujuk pada pandangan Hogwood dan Gunn, penelitian ini dapat memposisikan sistem zonasi bukan hanya sebagai keputusan pemerintah, melainkan sebagai proses yang meliputi perumusan, implementasi, hingga evaluasi, sehingga dapat ditelaah mengapa kebijakan ini menghasilkan konsekuensi yang tidak diantisipasi terhadap sekolah swasta. Dengan landasan teori ini, penelitian mengenai dampak sistem zonasi terhadap eksistensi sekolah swasta dapat menunjukkan bagaimana kebijakan yang dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan justru menimbulkan persoalan baru, yakni terancamnya keberlangsungan sekolah swasta.

## **2. Dampak Kebijakan**

### **a. Pengertian Dampak Kebijakan**

Thomas R. Dye menyatakan bahwa dampak sebuah kebijakan adalah pengaruhnya terhadap kondisi nyata (*The impact of a policy is its effect on real-world conditions*). Islamy juga mengartikan bahwa dampak kebijakan merupakan akibat-akibat atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan akibat dilaksanakannya suatu kebijakan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Islamy, *Kebijakan Publik*, 8.27.

Dampak kebijakan adalah perubahan atau akibat yang terjadi sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik. Dampak dapat berupa perubahan dalam aspek ekonomi, sosial, lingkungan, atau politik yang mempengaruhi masyarakat atau individu. Dalam konteks kebijakan, dampak dapat diukur berdasarkan seberapa besar kebijakan tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak kebijakan dapat bersifat positif dapat bersifat negatif, serta dapat timbul dalam jangka pendek atau panjang.<sup>42</sup>

Dikutip dari Sadhana, dampak dari suatu kebijakan akan dirasakan oleh berbagai unit sosial, termasuk individu dan keluarga, kelompok atau organisasi, masyarakat, lembaga, serta sistem sosial secara keseluruhan. Suatu kebijakan publik dalam pelaksanaannya akan menimbulkan dampak yang juga dapat diprediksi oleh pemangku kebijakan, baik itu dampak yang diinginkan ataupun dampak yang tidak diinginkan.<sup>43</sup>

Dampak merujuk pada perubahan dalam kondisi fisik maupun sosial yang terjadi sebagai hasil dari pelaksanaan suatu kebijakan. Hal ini mencakup konsekuensi yang timbul dari implementasi program terhadap kelompok sasaran, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, yang dapat memicu pola perilaku baru di antara kelompok

---

<sup>42</sup> Ana Lestari dkk., *Analisis Kebijakan Publik* (Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2025), 169.

<sup>43</sup> Nathalia Artha Malau dkk., *Kebijakan Publik* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), 164.

tersebut (*impact*). Selain itu, konsekuensi yang dihasilkan oleh suatu program terhadap kelompok sasaran, baik yang sesuai dengan harapan maupun yang tidak, dapat juga tidak menghasilkan perubahan perilaku baru di dalam kelompok tersebut (*effects*).<sup>44</sup>

#### **b. Evaluasi Dampak Kebijakan**

Thomas R. Dye mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai penilaian yang dilakukan secara objektif, sistematis, dan berbasis empiris terhadap dampak kebijakan yang sedang dilaksanakan, serta pencapaian sasaran yang ingin diraih. Sementara itu, William N. Dunn menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu prosedur analisis kebijakan yang bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan dalam memenuhi kebutuhan, nilai, dan peluang untuk menyelesaikan masalah. Robert Haveman, di sisi lain, mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai upaya untuk memahami dampak perilaku manusia terhadap program-program tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan program tersebut.<sup>45</sup>

Menurut Rossi dan Freeman, evaluasi dampak adalah proses yang mengukur sejauh mana sebuah program berhasil dalam menyebabkan perubahan dalam kehidupan individu. Secara umum, tujuan evaluasi dampak adalah untuk menilai apakah program atau

---

<sup>44</sup> Uddin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik* (CV. Sah Media, 2017), 132.

<sup>45</sup> Islamy, *Kebijakan Publik*, 8.3-8.4.

kebijakan yang diterapkan memberikan dampak positif atau negatif bagi pihak-pihak yang menjadi sasaran utama.<sup>46</sup>

Evaluasi dampak sangat memperhatikan *output* dan dampak dari kebijakan. Proses evaluasi ini mencakup beberapa aspek, antara lain:

- 1) Menentukan apakah program telah memberikan dampak yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga, dan lembaga.
- 2) Menilai apakah dampak yang terjadi berkaitan dengan intervensi program.
- 3) Mengeksplorasi akibat yang tidak terduga, baik yang bersifat positif maupun negatif.
- 4) Mengidentifikasi bagaimana program mempengaruhi peserta dan apakah perbaikan kondisi peserta benar-benar disebabkan oleh program atau faktor lain.

Dalam pemantauan hasil kebijakan, terdapat dua jenis konsekuensi, yaitu keluaran (*output*) dan dampak. Ukuran kebijakan mencakup barang, jasa, atau sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran, sedangkan dampak kebijakan merujuk pada perubahan nyata dalam perilaku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Zurqoni dkk., *Membumikan Pendidikan Karakter di Sekolah*, Pertama (PT Raja Grafindo Persada, 2021), 37.

<sup>47</sup> Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, 206.



Dye menyebutkan dampak kebijakan memiliki beberapa dimensi berupa (dimensi dampak):

- 1) Dampak kebijakan terhadap sasaran utama kebijakan atau dikenal dengan istilah dampak yang diharapkan (*intended consequence*)
- 2) Dampak kebijakan terhadap selain sasaran utama kebijakan atau dikenal dengan istilah dampak yang meluber ke dampak lain diluar yang diharapkan (*spillover or unintended effects*)
- 3) Dampak kebijakan pada situasi sekarang dan yang akan datang adalah dampak yang diharapkan terjadi sekarang setelah kebijakan dilaksanakan, selain itu terdapat dampak kebijakan yang terjadinya juga di masa yang akan datang (*antisipatif*)
- 4) Dampaknya pada biaya langsung, sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, adalah dampak kebijakan terhadap penggunaan dana dan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mewujudkan kebijakan secara nyata (*direct costs*)
- 5) Dampaknya pada biaya tidak langsung, termasuk peluang untuk melakukan hal-hal lainnya, adalah dampak terhadap pemanfaatan biaya tidak langsung (*indirect costs*) untuk mengimplementasikan kebijakan.<sup>48</sup>

Kajian teori mengenai dampak dan evaluasi kebijakan memiliki kedudukan penting dalam penelitian ini karena menjadi landasan konseptual

---

<sup>48</sup> Islamy, *Kebijakan Publik*.



untuk memahami bagaimana sistem zonasi pada akhirnya berpengaruh terhadap eksistensi sekolah swasta. Menurut Dye dan Islamy, setiap kebijakan pasti menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif, yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh kelompok sasaran. Dalam konteks penelitian ini, teori dampak kebijakan digunakan sebagai alat analisis untuk menilai berbagai konsekuensi dari penerapan sistem zonasi, seperti penurunan jumlah peserta didik, berkurangnya fasilitas, hingga kemungkinan penutupan sekolah swasta.

Selain itu, teori evaluasi kebijakan sebagaimana dikemukakan Dunn, Rossi, dan Freeman memberikan pijakan metodologis bagi peneliti untuk menilai sejauh mana kebijakan zonasi mencapai tujuannya. Melalui evaluasi, dapat diidentifikasi apakah kebijakan ini memberikan dampak yang diinginkan, memunculkan dampak tidak terduga, serta bagaimana pengaruhnya terhadap keberlangsungan sekolah swasta di masa kini maupun masa depan. Dengan demikian, kajian teori ini bermanfaat untuk menjadikan penelitian lebih sistematis, objektif, dan mendalam dalam menganalisis dampak sistem zonasi terhadap eksistensi sekolah swasta.

Untuk melihat sejauh mana dampak sistem zonasi terhadap eksistensi SMP Islam Fatahillah Kota Sukabumi, maka peneliti menggunakan indikator dampak menurut Thomas R. Dye. Penulis berpendapat bahwa penggunaan model dampak tersebut sudah sesuai dengan konteks penelitian yang dilakukan.

### 3. Sistem Zonasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan kebijakan sistem zonasi dengan tujuan untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Sistem zonasi diharapkan dapat menghilangkan stigma masyarakat tentang sekolah favorit dan *non*-favorit dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dengan adanya sistem zonasi pemerintah berharap setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

#### a. Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan peserta didik baru atau penerimaan peserta didik merupakan salah satu dari kegiatan manajemen peserta didik. Pada hakikatnya kegiatan ini merupakan proses pencarian, menentukan serta menarik calon peserta didik untuk menjadi murid di lembaga pendidikan yang bersangkutan yang diselenggarakan sebelum memasuki tahun ajaran baru.<sup>49</sup>

Tujuan dari penerimaan peserta didik baru adalah untuk menyediakan layanan bagi anak-anak usia sekolah atau lulusan agar dapat memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan cara yang tertib, terarah, dan berkualitas. Dalam prinsip penerimaan peserta didik baru, setiap anak usia sekolah memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi, tanpa adanya penolakan bagi

---

<sup>49</sup> Mohamad Mustari, *Manajemen Pendidikan* (Raja Grafindo Persada, 2014). Hal. 111

mereka yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di sekolah yang dipilih, baik itu sekolah negeri maupun swasta. Asas dari penerimaan peserta didik baru mencakup objektivitas, transparansi, akuntabilitas, kompetisi, dan non-diskriminasi.<sup>50</sup>

#### **b. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru**

Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru mencakup ketentuan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima oleh sekolah. Penentuan jumlah peserta didik ini didasarkan pada faktor-faktor kondisional yang dimiliki oleh sekolah, antara lain:

- 1) Kapasitas kelas
- 2) Kriteria penerimaan siswa
- 3) Anggaran yang tersedia
- 4) Sarana dan prasarana
- 5) Jumlah tenaga pendidik
- 6) Jumlah siswa yang sudah ada, dan lain-lain.<sup>51</sup>

Kebijakan penerimaan peserta didik baru disusun berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

#### **c. Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru**

Istilah zonasi awal diberlakukan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun 2017 yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang

---

<sup>50</sup> Rostini dkk., *Teori dan Praktik Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru SMK*.

<sup>51</sup> Ali, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah* (PT Bumi Aksara, 2011).

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.<sup>52</sup>

Sistem zonasi menetapkan bahwa sekolah negeri yang dikelola oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili dalam radius zona terdekat, dengan ketentuan minimal sekitar 90% dari total kapasitas peserta didik yang dapat diterima. Selain itu, jalur prestasi memiliki alokasi daya tampung sebesar 5%, dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali juga memiliki daya tampung sebesar 5% dari total kapasitas peserta didik yang dapat diterima.<sup>53</sup> Kemudian persentase tersebut berubah seiring diterapkannya peraturan-peraturan baru.

Sistem zonasi berfungsi untuk mempercepat pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan adil, sebagai bagian dari sinergi dan integrasi dalam pelayanan pembangunan pendidikan. Dalam pelaksanaan PPDB, sistem zonasi ini dapat berjalan dengan lebih objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, serta merata dan adil, sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak.<sup>54</sup> Hal

---

<sup>52</sup> Kemendikbud, *Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan* (Pusat Pangkalan dan Data Statistik dan Kebudayaan (PDSPK), 2018), 1, <https://repository.kemendikdasmen.go.id>.

<sup>53</sup> Kemendikbud, *Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan*.

<sup>54</sup> Kemendikbud, *Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan*.

ini penting untuk memastikan bahwa proses penerimaan peserta didik tidak hanya adil, tetapi juga tidak diskriminatif, sehingga semua calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sistem zonasi memiliki potensi untuk mengatasi ketimpangan dalam akses pendidikan, serta mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Kajian teori sistem zonasi memberikan dasar untuk memahami tujuan, prinsip, dan mekanisme kebijakan tersebut. Sistem zonasi pada dasarnya dirancang untuk pemerataan akses pendidikan, menghapus stigma sekolah favorit dan *non-favorit*, serta menjamin keadilan bagi semua peserta didik melalui penerimaan peserta didik baru. Dengan landasan teori ini, peneliti dapat menguraikan sejauh mana kebijakan sistem zonasi bekerja sesuai dengan prinsip objektivitas, transparansi, dan *non-diskriminasi*, serta apakah implementasinya sesuai dengan tujuan awal kebijakan dilaksanakan.

Dalam penelitian ini, teori sistem zonasi berfungsi sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara tujuan normatif kebijakan dengan realitas empiris di lapangan. Melalui kajian ini, peneliti dapat menguraikan sistem zonasi sebagai kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru yang bertujuan menciptakan pemerataan dalam implementasinya justru menimbulkan dampak serius bagi sekolah swasta.

#### 4. Eksistensi Sekolah Swasta

Secara etimologis, istilah eksistensi berasal dari bahasa Inggris "existence," yang diambil dari bahasa Latin "existere," yang berarti muncul, ada, atau timbul, serta merujuk pada keberadaan yang aktual. Kata "ex" berarti keluar, sedangkan "sistere" berarti muncul atau timbul. Dalam terminologi, eksistensi merujuk pada keadaan ada, yaitu segala sesuatu yang memiliki aktualitas, dan menekankan bahwa segala sesuatu itu memang ada.

Asal-usul istilah sekolah terdapat pada zaman Yunani Kuno. Sekolah berasal dari akar kata *skhole*, *scolae*, *scola* (bahasa Latin) yang berarti waktu luang atau waktu senggang. Sejarahnya orang Yunani Kuno memiliki kebiasaan mengisi waktu luang dengan mengunjungi seseorang yang pandai atau suatu tempat untuk mempelajari hal-hal yang penting dan perlu diketahui. Meskipun istilah sekolah berasal dari bahasa Latin, namun aktivitasnya yang mirip dengan tradisi Yunani Kuno itu terdapat di hampir semua peradaban Kuno, seperti China, Persia, Arab, India maupun Nusantara.<sup>55</sup> Meskipun asal-usul istilah sekolah dapat ditelusuri hingga zaman Yunani Kuno, namun eksistensi sekolah merupakan fenomena kehidupan modern

Pendidikan swasta telah eksis sebelum sekolah pemerintah lahir.

Seperti yang telah tercantum dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang

---

<sup>55</sup> Mohamad Ali, *Menggerakkan Pendidikan Muhammadiyah: Memupuk Nilai-Nilai Keunggulan untuk Membangun Perguruan Berkemajuan* (Muhammadiyah University Press, 2020), 97.

sistem pendidikan nasional pasal 55 dinyatakan mengenai peran masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan dan pemerintah dapat membantunya.<sup>56</sup>

Menurut Agus, eksistensi sekolah swasta sudah ada sejak pra-kemerdekaan sampai dengan sekarang. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh organisasi baik keagamaan maupun non keagamaan. Sumbangsih sekolah swasta sangat besar terhadap bangsa dan negara Indonesia yang melahirkan generasi-generasi yang cerdas, militan, berkepribadian, serta jiwa panggilan untuk memerdekakan diri dari penjajah.<sup>57</sup>

Eksistensi sekolah partikelir (swasta) mendapat tempat khusus dalam dalam UU No. 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran. Sikap pemerintah terhadap eksistensi sekolah swasta tercerminkan dalam pasal 13 yang menyatakan: (1) Atas dasar kebebasan tiap-tiap warga negara menganut suatu agama atau keyakinan hidup, maka kesempatan leluasa diberikan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah partikelir; (2) Peraturan-peraturan yang khusus tentang sekolah-sekolah partikelir ditetapkan dalam Undang-undang. Pasal 14 menyatakan: (1) Sekolah-sekolah partikelir yang memenuhi syarat, dapat menerima subsidi dari pemerintah untuk pembiayaannya; (2) Syarat-syarat tersebut di dalam ayat (1) dan peraturan pemberian subsidi ditetapkan

---

<sup>56</sup> Martono, *Sekolah Publik vs Sekolah Privat*, 27.

<sup>57</sup> Nanang Martono dkk., *Kematian Sekolah Swasta*, Pertama (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).



dalam Peraturan Pemerintah. Pasal-pasal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah terhadap eksistensi sekolah swasta.<sup>58</sup>

Perkembangan selanjutnya sekolah swasta mengalami peningkatan pesat. Peningkatan sekolah swasta dimulai pada akhir tahun 90-an (1998-1999). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan banyak peluang kepada sekolah swasta untuk berperan dalam pelayanan pendidikan. Peningkatan didasarkan pada dua poin utama. Pertama, sekolah swasta menjadi kebutuhan mutlak artinya soal swasta dipastikan sebagai solusi atas kekurangan kapasitas sekolah negeri. Jadi sekolah swasta adalah pelengkap sekolah negeri. Kedua, sekolah swasta dapat diposisikan sebagai pesaing sekolah umum. Ada beberapa sekolah yang menjadi sekolah favorit. Sementara itu, sekolah negeri juga harus bersaing dengan sekolah negeri lainnya.<sup>59</sup>

Sedangkan kajian teori mengenai eksistensi sekolah swasta memberikan dasar konseptual mengenai posisi sekolah swasta dalam sistem pendidikan nasional. Dalam teori yang telah dipaparkan di atas, menjelaskan bahwa eksistensi sekolah swasta dilindungi sekaligus diakui secara formal oleh negara. Hal ini menjadi pijakan peneliti dalam memahami bagaimana kebijakan sistem zonasi seharusnya tidak hanya menyangkut sekolah negeri, tetapi juga harus mempertimbangkan keberadaan sekolah swasta.

---

<sup>58</sup> Wasitohadi dan Rahayu, *Dinamika Sistem Pendidikan di Indonesia*, 22–23.

<sup>59</sup> Martono, *Sekolah Publik vs Sekolah Privat*, 140–41.



Kajian mengenai teori-teori yang telah dipilih dinilai sesuai dengan tujuan penelitian, teori tentang kebijakan dan dampaknya, serta sistem zonasi relevan untuk menganalisis bagaimana sistem zonasi dalam PPDB mempengaruhi distribusi peserta didik dan berdampak langsung pada keberlangsungan operasional sekolah swasta, terkhusus sekolah swasta menengah kebawah. Sementara itu, teori eksistensi sekolah swasta memberikan kerangka untuk memahami bagaimana sekolah swasta berupaya mempertahankan keberadaannya di tengah dinamika kebijakan sistem zonasi.

Pemilihan teori-teori tersebut dirasa tepat karena mampu menjadi landasan analitis yang kuat untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan sekolah swasta, terutama sekolah swasta yang rentan terdampak sistem zonasi. Oleh karena itu, penggunaan landasan teori dalam penelitian ini dinilai relevan, tepat, dan mendukung tercapainya tujuan penelitian dalam mengkaji dampak sistem zonasi terhadap eksistensi SMP Islam Fatahillah Kota Sukabumi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus, yaitu metode penelitian yang mendalam dan komprehensif terhadap satu kasus, menganalisis kompleksitas, serta mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi

kasus tersebut.<sup>60</sup> Penggunaan metode ini tepat digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap dampak sistem zonasi terhadap eksistensi SMP Islam Fatahillah yang merupakan fenomena dalam konteks yang nyata.

## **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **a. Tempat Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di SMP Islam Fatahillah yang berada di Kota Sukabumi, beralamat di Jl. A. Yani No. 329b, Kebonjati, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat.

### **b. Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada tanggal 05 Mei 2025 sampai dengan 23 Mei 2025.

## **3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian diambil menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu yang memiliki pemahaman yang relevan dengan tema penelitian. Adapun subjek penelitian yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>60</sup> Nasarudin Nasarudin dkk., *Studi Kasus dan Multi Situs dalam Pendekatan Kualitatif, Pertama* (CV. Gita Lentera, 2023).

a. Kepala Sekolah

Kepala sekolah berperan sebagai informan, yaitu sebagai sumber data yang memberikan informasi mengenai mengenai dampak penerapan sistem zonasi terhadap eksistensi SMP Islam Fatahillah Kota Sukabumi

b. Wakil Kesiswaan

Wakil kesiswaan berperan sebagai informan, yaitu sebagai data yang memberikan informasi mengenai keadaan SMP Islam Fatahillah Kota Sukabumi, setelah diberlakukannya PPDB sistem zonasi di sekolah negeri.

c. Guru

Guru berperan sebagai informan, yaitu sebagai data yang memberikan informasi mengenai penerimaan peserta didik baru di SMP Islam Fatahillah Kota Sukabumi.

d. Orang Tua/Wali Murid

Orang Tua/Wali Murid berperan sebagai informan, yaitu sebagai data yang memberikan informasi mengenai minat atau alasan orang tua/wali murid dalam menyekolahkan anaknya di SMP Islam Fatahillah Kota Sukabumi.

e. Siswa

Siswa berperan sebagai informan, yaitu sebagai data yang memberikan informasi mengenai minat atau alasan bersekolah di SMP Islam Fatahillah

#### 4. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melibatkan peneliti dalam pengamatan langsung terhadap perilaku, interaksi, atau situasi yang terjadi di lingkungan yang relevan dengan penelitian. Peneliti menggunakan metode observasi *non-partisipatif*, yaitu peneliti tidak ikut terlibat langsung dalam situasi yang diamati.<sup>61</sup>

Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian terhadap fenomena yang terjadi, namun tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas yang sedang berlangsung. Peneliti hanya bertindak sebagai pengamat pasif, sehingga tidak memberikan pengarahan maupun mempengaruhi perilaku subjek yang diamati.

Adapun yang dilakukan selama observasi di sekolah, peneliti mengamati dan mencatat kondisi lingkungan sekolah termasuk didalamnya fasilitas dan sarana prasarana, proses pembelajaran, serta jumlah peserta didik setiap kelas. Hal-hal yang diamati berkaitan dengan dampak sistem zonasi terhadap SMP Islam Fatahillah.

---

<sup>61</sup> Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasinya dalam Psikologi* (Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 36.

b. Wawancara

Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah semiterstruktur, tujuannya agar dapat menemukan permasalahan lebih terbuka, dimana narasumber dapat memberikan pendapat serta ide-idenya.<sup>62</sup> Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian terkait bagaimana kebijakan zonasi memberikan dampak terhadap eksistensi SMP Islam Fatahillah Kota Sukabumi secara langsung dan bagaimana SMP Islam Fatahillah Kota Sukabumi mengupayakan agar sekolah tetap menjaga operasionalnya.

Wawancara dilakukan dengan sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti sebagai panduan, namun tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk memberikan jawaban secara bebas dan mendalam. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat menggali informasi lebih luas ketika muncul hal-hal baru selama proses wawancara yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Wawancara dilaksanakan dalam dua periode, periode pertama dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2025 dengan narasumber guru dan peserta didik di lingkungan sekolah. Sementara itu, periode kedua dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025 dengan kepala sekolah di lingkungan sekolah dan orang tua/wali siswa di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

---

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 18 ed. (ALFABETA, cv., 2013), hal. 320.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang telah terjadi, rekaman tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>63</sup> Melalui teknik dokumentasi peneliti dapat mengambil dokumen-dokumen yang berada di internet mencakup sumber-sumber resmi dari situs lembaga terkait, berita artikel, publikasi online dan bahan lainnya yang berkaitan dengan dampak sistem zonasi terhadap sekolah swasta di Kota Sukabumi. Peneliti menelusuri dokumen-dokumen pada tahun sejak diberlakukannya sistem zonasi di Kota Sukabumi sampai dengan saat penelitian ini berlangsung. Kemudian data-data yang didapat digunakan sebagai pelengkap dari data-data yang telah didapatkan dari hasil observasi dan wawancara.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses penelitian, mulai dari dilakukannya pengumpulan data hingga pada tahap penulisan laporan. Menurut Miles dan Huberman, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam siklus, dimulai dari tahap satu hingga tiga, kemudian kembali ke tahap satu. Miles dan huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif menjadi tiga tahap, yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

---

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, hal. 329.

a. Kodifikasi data

Kodifikasi data adalah tahap di mana peneliti mengorganisir data dengan memberikan nama atau label pada hasil penelitian. Dari tahap ini, peneliti memperoleh tema-tema atau klasifikasi yang muncul dari data. Kemudian memberikan nama pada tema-tema atau klasifikasi dari tersebut. Peneliti juga menulis ulang catatan lapangan, mentranskrip hasil rekaman wawancara, dan memberikan kode interpretasi terhadap hasil yang diperoleh.<sup>64</sup>

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan seluruh data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut berupa catatan dari pengamatan, rekaman wawancara dan file dari dokumentasi. Kemudian rekaman wawancara di transkrip kata demi kata sehingga menghasilkan bentuk tulisan yang mudah dianalisis, sedangkan catatan observasi dirapikan kembali menjadi bentuk tulisan yang sistematis dan mudah dipahami.

Selanjutnya, peneliti memilih informasi yang penting dan tidak penting, serta memberikan tanda (*highlight color*) pada data yang sesuai dengan yang dicari. Peneliti mengklasifikasikan pada tiga rumusan masalah. Kemudian, peneliti menginterpretasikan apa disampaikan dalam penggalan data tersebut serta memberikan kode interpretasi. Dalam hal ini kode yang dipakai peneliti langsung merujuk pada setiap tema dengan memberikan *highlight color* yang berbeda.

---

<sup>64</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT Raja Grafindo Persada, 2014).

b. Tahap penyajian data

Penyajian data adalah tahap lanjutan dalam analisis di mana peneliti menyajikan temuan penelitian dalam bentuk kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman merekomendasikan penggunaan matriks dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian, yang mencerminkan temuan yang telah diperoleh.<sup>65</sup> Pada tahap ini peneliti menyajikan temuan menggunakan tabel.

c. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini merupakan langkah lanjutan di mana peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap hasil wawancara atau dokumen yang telah dianalisis.<sup>66</sup> Setelah kesimpulan diambil peneliti memeriksa ulang kodifikasi dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan.

Ketiga tahapan dalam analisis data dilakukan terus setiap pengumpulan data sampai dengan penelitian berakhir.

## 6. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi, yaitu merupakan proses pengecekan data dari berbagai sumber dan waktu. Dalam menentukan validitas data yang terkumpul untuk

---

<sup>65</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*.

<sup>66</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*.



menjamin ketepatan atau kesesuaian sumber data dengan data yang diperlukan peneliti menggunakan Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan, yaitu dengan cara memverifikasi informasi data telah diperoleh melalui sumber yang berbeda.

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data dengan sumber/perspektif yang berbeda. Seperti perspektif kepala sekolah, guru, siswa, orang tua/wali siswa. Peneliti kemudian membandingkan hasil data dari setiap narasumber untuk menemukan konsistensi, ketidaksesuaian, atau informasi tambahan yang muncul. Ketika menemukan ketidaksesuaian peneliti menelusuri dokumentasi sebagai pendukung dari pernyataan tersebut. Tidak hanya ketidaksesuaian peneliti juga menelusuri dokumentasi sebagai pendukung dari pernyataan-pernyataan narasumber untuk memastikan temuan yang dihasilkan benar dan dapat dipercaya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan teknik keabsahan data.

BAB II berisikan bagian yang menjelaskan gambaran umum SMP Islam Fatahillah Sukabumi.

BAB III berisikan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB IV berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai dampak sistem zonasi terhadap eksistensi sekolah swasta dengan studi kasus SMP Islam Fatahillah kota Sukabumi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian mengenai dampak sistem zonasi terhadap SMP Islam Fatahillah bahwa sistem zonasi berdampak secara signifikan terhadap SMP Islam Fatahillah. Adapun hal-hal yang terdampak yaitu penurunan jumlah peserta didik baru yang berdampak langsung pada berkurangnya anggaran operasional sekolah. Akibat dari keterbatasan anggaran tersebut berimplikasi pada penurunan motivasi baik di kalangan guru maupun siswa, dan juga berdampak terhadap menurunnya kualitas dan fasilitas sekolah. Dalam jangka panjang, jika dampak ini terus menerus dirasakan eksistensi SMP Islam Fatahillah akan terancam.
2. Adapun upaya yang dilakukan SMP Islam Fatahillah dalam menjaga eksistensi sekolah swasta adalah meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas pelayanan, mengadakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menggratiskan biaya masuk, memberikan beasiswa dengan ketentuan yang berlaku.
3. Adapun upaya pemerintah dalam menyikapi dampak yang terjadi terhadap eksistensi sekolah swasta di kota Sukabumi adalah hanya wacana, peran

pemerintah terhadap kondisi yang terjadi di sekolah swasta sangat minim, tidak terlihat akan keberpihakannya terhadap mendukung eksistensi sekolah swasta di Kota Sukabumi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian berikut saran yang diberikan peneliti sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terkait dampak sistem zonasi terhadap eksistensi sekolah swasta:

1. SMP Islam Fatahillah sebaiknya melakukan peningkatan strategi pemasaran dan promosi. Salah satunya yaitu dengan memperluas jangkauan promosi melalui berbagai platform media sosial yang sedang banyak diminati masyarakat, seperti Instagram, Facebook, Tiktok, maupun platform lainnya. Kemudian, SMP Islam Fatahillah perlu menyediakan akses informasi lebih mudah terkait informasi sekolah melalui pembuatan dan pengelolaan website resmi sekolah. Website tersebut dapat memuat profil sekolah, program unggulan, prestasi sekolah dan peserta didik, hingga informasi PPDB yang terbaru, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan.
2. Pemerintah Kota Sukabumi diharapkan dapat lebih memberikan perhatian yang serius terhadap eksistensi sekolah swasta, dengan memberikan kebijakan yang tidak memberatkan sekolah swasta. Selain itu, pemerintah Kota Sukabumi juga harus tegas dalam memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dalam proses PPDB, sehingga memberikan efek jera dan mencegah pelanggar-pelanggar lainnya.

### C. Kata Penutup

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahman dan rahimnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam prosesnya, penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Banyak dinamika, hambatan, dan tantangan yang penulis hadapi. Ada masa penulis merasa ragu sehingga terhenti dalam waktu yang cukup lama. Namun, melalui doa, dukungan, serta kesabaran, sedikit demi sedikit penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan hingga tahap akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi serta perbaikan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan, skripsi yang berjudul "*Dampak Sistem Zonasi Terhadap Eksistensi SMP Islam Fatahilah Kota Sukabumi*" ini, penulis berharap skripsi dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Penulis juga berharap skripsi ini memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan, khususnya dalam membuat suatu kebijakan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendampingi dan memberikan dukungan, baik secara moral maupun akademi. Semoga segala bantuan dan kebaikan menjadi amal ibadah yang mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ali. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. PT Bumi Aksara, 2011.
- Ali, Mohamad. *Menggerakkan Pendidikan Muhammadiyah: Memupuk Nilai-Nilai Keunggulan untuk Membangun Perguruan Berkemajuan*. Muhammadiyah University Press, 2020.
- Apriyanti, Lili, dan Syunu Trihantoyo. *Persepsi Masyarakat Tentang Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru*. 10 (2022).
- Ariyanto, Reynaldy Aries, dan N Chamidah. "Sentiment Analysis for Zoning System Admission Policy Using Support Vector Machine and Naive Bayes Methods." *Journal of Physics: Conference Series* 1776, no. 1 (2021): 012058. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1776/1/012058>.
- Awaludin, Asep. "Jelang PPDB, Sekolah Swasta di Kota Sukabumi Dibayangi Sepi Peminat Gegara Ini." *Sukabumi Update*, Jumat Mei 2024. <https://www.sukabumiupdate.com/sukabumi/141505/jelang-ppdb-sekolah-swasta-di-kota-sukabumi-dibayangi-sepi-peminat-gegara-ini>.
- Edi, Syamsul. *Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan*. t.t.
- Fatimah, Siti. "Sepi Peminat, Sekolah Swasta di Sukabumi Terancam Mati!" Agustus 2022. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6218194/sepi-peminat-sekolah-swasta-di-sukabumi-terancam-mati>.
- Fattah, Nanang. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Kedua. PT Remaja Rosdakarya, 2023.
- Hadi, Dharmawan. "3 SMK Swasta di Kota Sukabumi Terpaksa Tutup, Jumlah Siswa Hanya 5 Orang." *iNews Sukabumi*, Agustus 2022. <https://sukabumi.a.id/read/139237/3-smk-swasta-di-kota-sukabumi-terpaksa-tutup-jumlah-siswa-hanya-5-orang>.

- Harianti, dan Linda Novita Sukma. *Analisis Kebijakan Sistem Zonasi untuk Pemerataan Pendidikan di SMAN 1 dan 2 Kota Blitar*. 15 (2024).  
<https://doi.org/10.21831/foundasia.v15i2.77352>.
- Hilmi, Abdullah Fakhri. “Lalu Lalang Kebijakan Zonasi Pendidikan.” *Times Indonesia*, Desember 2024. <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/522541>.
- Islami, Muhammad Fajri, Nasir, Rasid, Nurzaima, dan Mujiati Mujiati. “Perbandingan Kualitas Pendidikan Antara Sekolah Negeri Dan Sekolah Swasta: Eksplorasi Pada Aspek Pembelajaran.” *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan* 11, no. 2 (2024): 183–96. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2024.v11.i2.p183-196>.
- Islamy, Muh. Irfan. *Kebijakan Publik*. Kedua. Universitas Terbuka, 2014.
- Jamil, Muhammad, Suswati Hendriani, dan Devy Aisyah. “Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar.” *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan* 11, no. 3 (2023): 1089–103. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v11i3.941>.
- Kaffa, Zelmi, Sentot Setia Budi, dan Nurhizrah Gistituati. *Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi*. 5 (2021).
- Karmila, Mila, dan Niswatu Syakira. *Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru*. t.t.
- Kemendikbud. *Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan*. Pusat Pangkalan dan Data Statistik dan Kebudayaan (PDSPK), 2018. <https://repositori.kemendikdasmen.go.id>.
- Kemendikdasmen. *Data Referensi Pendidikan*. t.t. <https://referensi.data.kemendikbud.go.id>.
- Kementrian Pendidikan dan Menengah Dasar. *Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)*. t.t. <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/FB7906327DA44C22DDAC>.

- Kumparan. “Dampak Sistem Zonasi: Sekolah Swasta di Sukabumi Sepi Siswa Baru.” Sukabumi Update, 16 Juli 2019. <https://kumparan.com/sukabumi-update/dampak-sistem-zonasi-sekolah-swasta-di-sukabumi-sepi-siswa-baru-1rTfgKzPD04/full>.
- Lestari, Ana, Rostami, Miriam Diana Kalagison, Saiful Ichwan, dan M. Arifin Abd Kadir. *Analisis Kebijakan Publik*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2025.
- Madiana, Ira, Bagdawansyah Alqadri, Lalu Sumardi, dan Mohamad Mustari. “Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi serta Dampaknya terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan.” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 7, no. 2c (2022): 735–40. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.633>.
- Malau, Nathalia Artha, Ari Kurniawan, dan Kusmendar. *Kebijakan Publik*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Martono, Nanang. *Sekolah Publik vs Sekolah Privat: Dalam Wacana Kekuasaan, Demokrasi, dan Liberalisasi Pendidikan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Martono, Nanang, Elis Puspitasari, dan FX Wardiyono. *Kematian Sekolah Swasta*. Pertama. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Mustari, Mohamad. *Manajemen Pendidikan*. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Nasarudin, Nasarudin, Sawal Mahaly, dan Ma’rifatul Munjiah. *Studi Kasus dan Multi Situs dalam Pendekatan Kualitatif*. Pertama. CV. Gita Lentera, 2023.
- Ni’matuzahroh, dan Susanti Prasetyaningrum. *Observasi: Teori dan Aplikasinya dalam Psikologi*. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Nugroho, Dr. Riant. *Public Policy*. Revisi. PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Pangestuti, Asih. “Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan.” *Jurnal READ (Research of Empowerment and Development)* 2, no. 1 (2021): 15. <https://doi.org/10.20884/1.read.2021.2.1.4337>.



- Putri Purwati, Nikita, Nur Holiso, Nu'rani Indah Sukmah, Syunu Trihantoyo, dan Nubhanudin Nubhanudin. "Implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di SMPN 59 Surabaya." *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 3, no. 1 (2024): 162–68. <https://doi.org/10.31004/jpion.v3i1.247>.
- Radarsukabumi. "Ketua DPRD Kota Sukabumi: Sistem Zonasi Perlu Dievaluasi." Radarsukabumi, Mei 2019. <https://radarsukabumi.com/berita-utama/ketua-dprd-kota-sukabumi-sistem-zonasi-perlu-dievaluasi/>.
- Rayadie, Ahmad. "Sistem Zonasi PPDB 2018 Dinilai Tak Cocok Diterapkan di Sukabumi." *Pikiran Rakyat*, 13 Juli 2018. <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01299248/sistem-zonasi-ppdb-2018-dinilai-tak-cocok-diterapkan-di-sukabumi-427326>.
- Rihayati, Eres. "Zonation Evaluation System In Recruitment New Student To Senior High School At Sukabumi Down Town." *Jurnal Penelitian Dan Penilaian Pendidikan* 4, no. 1 (2022): 40–51. <https://doi.org/10.22236/jppp.v4i1.8380>.
- Rostini, Deti, Siti Solekah, Raden Hastuti, dan Parid Ashari. *Teori dan Praktik Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru SMK*. Pertama. CV. Zeenbook Publishing, 2023.
- Satria, Dani. "Dampak Pelaksanaan Kebijakan Peserta Didik Baru (PPDB Sistem Zonasi Terhadap Mutu Belajar Siswa di SMA Negeri 2 Bandar Lampung." 2019.
- Sirojudin, Didin, Siti Zulaikha, dan Suryadi. *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri di DKI Jakarta*. 2020.
- Sore, Uddin B. dan Sobirin. *Kebijakan Publik*. CV. Sah Media, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. 18 ed. ALFABETA, cv., 2013.
- Sumardi, Endang. "PPDB SMP di Kota Sukabumi Menggunakan Sistem Zonasi." Facebook. Diskominfo Kota Sukabumi, 5 Juli 2018.



<https://web.facebook.com/diskominfokotsi/photos/ppdb-smp-di-kota-sukabumi-menggunakan-sistem-zonasi-reporter-redaktur-endang-sum>.

Thoha, Mohammad, dan H.A. Ghazali. “Dampak Penerapan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.” *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2020): 141. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v15i1.3302>.

Ula, Dany Miftahul, dan Irvan Lestari. “Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama.” *Brilliant: Jurnal Riset dan Konseptual* 5, no. 1 (2020): 10. <https://doi.org/10.28926/briliant.v5i1.375>.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Legislation No. 20 Tahun 2003, UU RI 37 (2003). <https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003>.

Vinalistyosari, Risca Candra, Anang Santoso, dan Radeni Sukma Indra Dewi. *Dampak Sistem Zonasi pada Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Pertama terhadap Minat Belajar Siswa Kelas 6*. 06, no. 01 (2023).

Wahyudi, Rinto. “Agus Pren, Pemerhati Pendidikan Sukabumi Angkat Bicara: Sistem Zonasi Pada PPDB Kota Sukabumi Bau Mulut.” Webs. Suarana, 13 Juli 2024. <https://www.suarana.com/2024/07/agus-fren-pemerhati-pendidikan-sukabumi.html>.

Wasitohadi, dan Theresia Sri Rahayu. *Dinamika Sistem Pendidikan di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.

Winarti, Novi, Khairi Rahmi, dan Rizky Octa Putri Charin. “Harapan Pemerataan Menghadapi Kesenjangan: Analisis Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Tanjungpinang.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 49, no. 2 (2023): 210–25. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i2.3579>.

Wiranto, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. MedPrees, 2007.

Yulianti, Rahmatika, dan Puji Astuti. “Studi Evaluasi Dampak Kebijakan Zonasi Terhadap Peserta Didik Baru Tingkat SMA di Kecamatan Purwokerto Timur Tahun Ajaran 2022/2023.” *Journal of Politic and Government Studies* 14, no. 2 (2025): 1339–51.

Zurqoni, Heri Retnawati, Ezi Apino, dan Rizqa Devi Anazifa. *Membumikan Pendidikan Karakter di Sekolah*. Pertama. PT Raja Grafindo Persada, 2021.

